



**AKUNTANSI
DEWANTARA**

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

JURNAL.USTJOGJA.AC.ID



PEMAHAMAN PELAKU UMKM TERHADAP SAK EMKM : SURVEY PADA UMKM YANG TERDAFTAR DI DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PEKANBARU

Neneng Salmiah*

Satria Tri Nanda

Intan Adino

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Lancang Kuning
Pekanbaru Riau
nenengsalmiah@unilak.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted at the Pekanbaru City Cooperatives and SMEs Office, aimed to find out the level of understanding of MSMEs registered in the Pekanbaru City Cooperatives and SMEs Office towards EMKM SAK. The population in this study were all MSMEs who have IUMK at the Pekanbaru City Cooperatives and SMEs Office, totaling 1,102 while 92 samples were obtained using the Slovin Formula and the sample selection method used incidental sampling. In this study using primary data and data collection techniques are observation and questionnaires. The data obtained is then analyzed quantitatively by making a score range. The results of the study found that the understanding of the UMKM Actors registered with the Pekanbaru City Office of Cooperatives and SMEs was still at a sufficient level.

INFO ARTIKEL

Diterima: 10 Juli 2018

Direview: 13 Juli 2018

Disetujui: 27 September 2018

Terbit: 30 Oktober 2018

Keyword:

SAK EMKM, UMKM

PENDAHULUAN

Setiap usaha diharapkan mempunyai laporan keuangan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Namun praktek akuntansi keuangan pada UMKM masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi : 2004).

Penelitian yang dilakukan Salmiah et.al (2015) dengan judul penerapan akuntansi pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP menemukan bahwa 83% UMKM tidak memahami isi SAK ETAP, 70% responden tidak menggunakan software akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu dan relevan, dan 70% responden sebagai pelaku UMKM tidak memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan sehingga informasinya tidak lengkap. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan, pemahaman serta kesadaran akan pentingnya penerapan akuntansi secara lengkap dan sesuai dengan SAK ETAP bagi pelaku UMKM terutama dalam proses penyusunan

laporan keuangan dalam rangka memperoleh informasi tentang kegiatan usaha selama satu periode akuntansi.

Penelitian yang dilakukan Saragih dan Surikayanti (2015) dengan judul Analisis penerapan akuntansi dan kesesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan menemukan bahwa (1) penerapan akuntansi dilihat dari penyajian pelaporan keuangan pada UKM tersebut masih sederhana yaitu dengan melakukan pencatatan atas transaksi yang sering terjadi dalam usahanya. Sebagian besar UKM hanya membuat laporan laba-rugi. (2) Penerapan akuntansi yang dilakukan UKM di Jalan Seram, kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai SAK ETAP serta tidak adanya Sosialisasi ataupun pelatihan dari pihak pemerintah maupun lembaga yang membawahi UKM masih kurang maksimal, sehingga pemahaman akan pentingnya SAK ETAP masih belum dipahami pelaku UKM

Seiring perkembangannya, terdapat kebutuhan mengenai ketersediaan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK Umum berbasis IFRS dan SAK ETAP bagi UMKM dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan menggunakan kedua pilar SAK tersebut. Karena itu, DSAK IAI melakukan pengembangan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan menghadirkan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Hingga pada akhirnya pada tahun 2016, DSAK IAI mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018 sebagai upaya mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP.

Dengan adanya SAK EMKM maka diharapkan UMKM lebih maju dan mandiri misalnya UMKM dapat menyeleggarakan pencatatan atas laporan keuangan usahanya. Mengingat informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal untuk memperoleh kredit dari bank, tujuan pelaporan pajak maupun tujuan internal perusahaan seperti pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan usaha, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan dengan adanya SAK EMKM akan meningkatkan profesionalitas dari UMKM. Dengan adanya SAK EMKM, maka UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP. Di dalam beberapa hal SAK EMKM memberikan banyak kemudahan bagi UMKM karena SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP.

Walaupun SAK EMKM dinyatakan lebih sederhana dan lebih mudah penerapannya dibandingkan dengan SAK Umum berbasis IFRS dan SAK ETAP, tidaklah semudah yang dikatakan karena untuk menerapkan SAK EMKM dalam proses pelaporan keuangan tentunya memerlukan pemahaman yang cukup bagi pelaku UMKM namun di sisi lain Suhairi (2004) menyatakan bahwa kesadaran UMKM dalam melaksanakan praktik keuangan masih rendah dan memiliki banyak kendala dan kelemahan yang disebabkan tingkat pendidikan yang rendah dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Disamping itu, SAK EMKM yang dianggap lebih mudah tapi relatif baru bagi entitas bisnis maupun pemerintah dan pihak lainnya. Suksesnya implementasi SAK EMKM secara keseluruhan adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan dari pelaku UMKM. Untuk itu penelitian tentang pemahaman SAK EMKM bagi pelaku UMKM ini sangat perlu untuk dilakukan.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 6, agar usaha mikro dan kecil ini dapat berkembang dengan baik maka izin mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha mikro dan kecil, karena Izin merupakan instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, bagi pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis

untuk mengendalikan tingkah laku warga negara. Pemerintah wajib dalam melindungi dan memfasilitasi UMK untuk pengembangan usahanya.

Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru bahwa jumlah UMKM yang telah memiliki IUMK yang tersebar pada 12 Kecamatan adalah sebanyak 1.102 UMKM dengan rincian sebagai berikut: Kecamatan Pekanbaru Kota 32 IUMK, Kecamatan Sukajadi 46 IUMK, Kecamatan Sail 75 IUMK, Kecamatan Senapelan 301 IUMK, Kecamatan Lima Puluh 21 IUMK, Kecamatan Rumbai 48 IUMK, Kecamatan Bukit Raya 27 IUMK, Kecamatan Tampan 137 IUMK, Kecamatan Rumbai Pesisir 64 IUMK, Kecamatan Payung Sekaki 58 IUMK, Kecamatan Marpoyan Damai 47 IUMK, Kecamatan Tenayan Raya 246 IUMK. Bagi UMKM yang telah memiliki IUMK tersebut tentunya mempunyai peluang untuk memperoleh akses pendanaan dari pemerintah yaitu kredit usaha rakyat namun UMKM tersebut tentunya harus mempunyai laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi keuangan (Dinas Koperasi Dan UKM Kota Pekanbaru : 2017).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan judul: “Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru ”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. (DSAK:2016:1 Par 1.1). Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama 2 tahun berturut-turut (DSAK:2016:1 Par 1.2).

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditur maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (DSAK:2016:2 Par 2.1).

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan keuangan (DSAK:2016:2 Par 2.2). Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi (DSAK:2016:2 Par 2.8).

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur sebagaimana diuraikan dalam paragraph 2.1 dan 2.8 dan memenuhi kriteria sebagai berikut (DSAK:2016:2 Par 2.12):

- (a) Manfaat ekonomik yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir kedalam atau keluar dari entitas dan

- (b) Pos tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui asset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan (DSAK:2016:2 Par 2.15). Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis (DSAK:2016:2 Par 2.16).

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut (DSAK:2016:2 Par 2.19). Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha) (DSAK:2016:2 Par 2.20). Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya (DSAK:2016:2 Par 2.21).

Penyajian wajar dari laporan keuangan sesuai dipersyaratkan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. (DSAK:2016:3 Par 2.1). Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan: (DSAK:2016:3 Par 2.3):

- (a) Relevan
- (b) Representasi tepat
- (c) Keterbandingan
- (d) Keterpahaman

Entitas yang laporan keuangannya yang telah patuh terhadap SAK EMKM membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK EMKM dalam catatan atas laporan keuangan (DSAK:2016:3 Par 3.4). Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan, termasuk informasi komparatifnya (DSAK:2016:3 Par 3.5). Laporan keuangan minimum terdiri dari (DSAK:2016:3:Par 3.9) :

- (a) Laporan posisi keuangan pada akhir periode
- (b) Laporan laba rugi selama periode
- (c) Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

Definisi & Karakteristik UMKM

Pasal 6 UU RI No 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Pemahaman Terhadap SAK EMKM

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia paham memiliki arti pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Ini berarti

bahwa orang yang memiliki pemahaman standar akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar standar akuntansi.

Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, dan pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Sehingga, pemahaman akuntansi berarti kemampuan untuk mengukur, mengklasifikasikan (membedakan), dan mengikhtisarkan (menyajikan) unsur-unsur laporan keuangan. SAK EMKM adalah suatu standar akuntansi yang digunakan bagi entitas mikro, kecil dan menengah yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Maka pemahaman SAK EMKM merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mengukur, mengklasifikasi (membedakan) dan mengikhtisarkan penyajian unsur-unsur laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAK EMKM.

Pengembangan Hipotesis

Dari pendahuluan dan landasan teori dapat dibuat hipotesis yang akan dibuktikan yaitu tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM tinggi.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian adalah pemahaman SAK EMKM bagi pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang telah memiliki IUMK pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru yang berjumlah 1.102 UMKM. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 92 UMKM.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari menyebarkan kuesioner kepada responden. Variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman terhadap SAK EMKM. Pemahaman terhadap SAK EMKM adalah sejauhmana pelaku UMKM memahami SAK EMKM yang meliputi pengukuran (biaya historis), asumsi dasar (dasar akrual, kelangsungan usaha, dan konsep entitas bisnis), dan penyajian laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan). Dalam menganalisis data, menggunakan statistik deskriptif atau dekriptif kuantitatif.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tanggapan responden (Pelaku UMKM) terhadap variabel yang diteliti (pemahaman terhadap SAK EMKM yang meliputi pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan). Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata yang diperoleh dari skor jawaban responden. Untuk mengukur nilai skor tiap pernyataan digunakan skala penilaian dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono : 2014 : 239):

$$\text{Range} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Range Skor}}$$

$$\text{Range} = \frac{5 - 1}{5}$$

$$\text{Range} = 0,8$$

Selanjutnya berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh nilai range skor tiap pernyataan sebagai berikut: 1,00 - 1,80 : sangat rendah, 1,81 - 2,60 : rendah, 2,61 - 3,40 : cukup, 3,41 - 4,20 : tinggi, 4,21 - 5,00 : sangat tinggi.

Untuk mengetahui pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM yaitu dengan memberi skor untuk setiap item pernyataan yang berjumlah 8 pernyataan yang terbagi tiga bagian yaitu pengukuran (1 pernyataan), asumsi dasar (3 pernyataan), dan penyajian laporan keuangan (4 pernyataan). Adapun skor untuk setiap jawaban dari kuesioner, dengan ketentuan: Jawaban sangat

setuju diberi skor 5, Jawaban setuju diberi skor 4, Jawaban tidak tahu diberi skor 3, Jawaban tidak setuju diberi skor 2, Jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah SAK EMKM. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata yang diperoleh dari skor jawaban responden. Untuk mengukur nilai skor tiap pernyataan digunakan skala penilaian dengan rumus sebagai berikut (Sugiyono:2014:239):

$$\text{Range} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Range Skor}}$$

$$\text{Range} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Selanjutnya berdasarkan rumus di atas dapat diperoleh nilai range skor tiap pernyataan sebagai berikut: 1,00 - 1,8 = sangat rendah, 1,81 - 2,6 = rendah, 2,61 - 3,4 = cukup, 3,41 - 4,2 = tinggi, 4,21 - 5,0 = sangat tinggi.

Untuk mengetahui tanggapan responden (Pelaku UMKM) tentang SAK EMKM yang merupakan gambaran pemahaman Pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru terhadap SAK EMKM itu sendiri, didapat melalui bentuk pernyataan yang telah disesuaikan dengan indikator-indikator variabel. Tanggapan responden terhadap SAK EMKM yang meliputi pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Rekapitulasi Pemahaman Responden terhadap SAK EMKM

NO.	PERNYATAAN INDIKATOR VARIABEL	KRITERIA JAWABAN						JLH	RATA-RATA	KET.
		5	4	3	2	1				
1. PENGUKURAN										
1	Menurut SAK EMKM, dasar pengukuran unsur laporan keuangan adalah biaya historis	FREK	13	47	27	5	0	92	3.74	Tinggi
		SKOR	65	188	81	10	0	344		
2. ASUMSI DASAR										
2	Menurut SAK EMKM, entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi akrual basis	FREK	0	24	44	24	0	92	3.00	Cukup
		SKOR	0	96	132	48	0	276		
3	Menurut SAK EMKM, entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis	FREK	0	12	50	30	0	92	2.80	Cukup
		SKOR	0	48	150	60	0	258		
4	Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen (pelaku UMKM) menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya (kelangsungan usaha)	FREK	25	48	18	1	0	92	4.05	Tinggi
		SKOR	125	192	54	2	0	373		
	JUMLAH		25	84	112	55	0	276	3.29	Cukup
	SKOR		125	336	336	110	0	907		
3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN										
5	Menurut SAK EMKM, laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan	FREK	28	55	8	1	0	92	4.20	Tinggi
		SKOR	140	220	24	2	0	386		
6	Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode	FREK	0	3	53	36	0	92	2.64	Cukup
		SKOR	0	12	159	72	0	243		
7	Laporan laba rugi menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan pajak penghasilan	FREK	0	7	51	34	0	92	2.71	Cukup
		SKOR	0	28	153	68	0	249		
8	Catatan atas laporan keuangan menyajika informasi tentang suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan	FREK	0	5	55	32	0	92	2.71	Cukup
		SKOR	0	20	165	64	0	249		
	JUMLAH		28	70	167	103	0	368	3.06	Cukup
	SKOR		140	280	501	206	0	1127		
	JUMLAH PEMAHAMAN SAK EMKM		66	201	306	163	0	736	3.23	Cukup
	SKOR PEMAHAMAN SAK EMKM		330	804	918	326	0	2378		

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018

Berdasarkan tabel 1 yang direkap sesuai hasil uji statistik deskriptif diketahui bahwa tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disesuaikan dengan indikator variabel pemahaman terhadap SAK EMKM terhadap 92 orang sebagai responden terpilih memiliki rata-rata tanggapan yaitu 3,23. Ini memiliki arti bahwa jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disesuaikan dengan indikator SAK EMKM tergolong dalam kategori cukup. Nilai rata-rata sebesar 3,23 atau kategori cukup tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari responden tidak tahu

dengan SAK EMKM yang diukur dari aspek pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM adalah tinggi, tidak terbukti.

Nilai rata-rata tanggapan responden tentang SAK EMKM dari aspek pengukuran, asumsi dasar, dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut: tanggapan tentang pengukuran menggunakan biaya historis dengan nilai rata-rata 3,74 (tinggi), kemudian pernyataan asumsi dasar (akrual basis, entitas bisnis, kelangsungan usaha) dengan nilai rata-rata 3,29 (cukup) dan pernyataan tentang penyajian laporan keuangan (komponen minimum laporan keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan L/R, informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan) memperoleh nilai rata-rata 3,06 (cukup).

Tanggapan responden terhadap SAK EMKM mengenai asumsi dasar, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,29 atau dengan kategori cukup. Tanggapan responden yang tinggi tentang SAK EMKM mengenai asumsi dasar, hanya pada pernyataan “Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen (Pelaku UMKM) menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya (kelangsungan usaha)” yaitu dengan nilai rata-rata 4,05 (tinggi). Sedangkan tanggapan asumsi dasar akrual basis dan asumsi dasar entitas bisnis masing-masing memperoleh nilai rata-rata 3,00 dan 2,80 dengan kategori masing-masing cukup.

Tanggapan responden terhadap SAK EMKM mengenai penyajian laporan keuangan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,06 atau dengan kategori cukup. Tanggapan responden yang tinggi tentang SAK EMKM mengenai penyajian laporan keuangan, hanya pada pernyataan “Menurut SAK EMKM, laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan” yaitu dengan nilai rata-rata 4,20 (tinggi). Sedangkan tanggapan penyajian laporan keuangan tentang informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,64 (cukup), tanggapan penyajian laporan keuangan tentang informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,71 (cukup), dan tanggapan penyajian laporan keuangan tentang informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,71 (cukup).

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada table 1 ditemukan bahwa tanggapan responden yang berjumlah 92 orang pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru mengenai pemahaman terhadap SAK EMKM memperoleh nilai rata-rata 3,23. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM hanya pada tingkat cukup. Jika dikaitkan dengan skala pada kuesioner dimana skala 3 adalah untuk jawaban tidak tahu. Dengan demikian nilai rata-rata dari jawaban kuesioner tentang SAK EMKM sebesar 3,23 kategori cukup menunjukkan rata-rata pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru tidak tahu dengan SAK EMKM. Dengan kata lain, pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang tinggi terhadap SAK EMKM.

Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap SAK EMKM diukur dari 3 aspek yaitu pertama: aspek pengukuran dimana menurut SAK EMKM, dasar pengukuran unsur laporan keuangan adalah biaya historis, kedua: asumsi dasar dalam menyusun laporan keuangan terdiri dari 3 asumsi yaitu akrual basis, konsep entitas bisnis, dan asumsi kelangsungan usaha. Ketiga, pemahaman terhadap SAK EMKM diukur dari penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 4 pernyataan yaitu komponen minimum laporan keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi, dan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM yang masih pada tingkat cukup dapat dijelaskan dari ketiga aspek sebagai indikator SAK EMKM. Indikator pertama adalah menurut SAK

EMKM, pengukuran unsur laporan keuangan menggunakan biaya historis memperoleh nilai rata-rata 3,74. Hal ini memiliki arti bahwa pemahaman Pelaku UMKM terhadap dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan menggunakan biaya historis adalah tinggi.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui asset, liabilitas, penghasilan dan beban didalam laporan keuangan. Menurut SAK EMKM, asset diukur sebesar kas/setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh asset pada saat perolehan. Ini artinya asset diukur di dalam laporan keuangan sebesar harga perolehan atau biaya perolehannya. Menurut SAK EMKM, liabilitas atau kewajiban diukur sebesar kas/setara kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk menyelesaikan liabilitas. Pengukuran dengan biaya historis ini sangat mudah difahami oleh Pelaku UMKM karena begitulah praktek pengukuran yang selama ini sudah diterapkan oleh Pelaku UMKM tersebut.

Pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM yang masih pada tingkat cukup dapat dijelaskan dari ketiga aspek sebagai indikator SAK EMKM. Indikator kedua adalah tanggapan responden terhadap SAK EMKM mengenai asumsi dasar, diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,29 atau dengan kategori cukup. Tanggapan responden yang tinggi tentang SAK EMKM mengenai asumsi dasar, hanya pada pernyataan “Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen (Pelaku UMKM) menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya (kelangsungan usaha)” yaitu dengan nilai rata-rata 4,05 (tinggi). Sedangkan tanggapan asumsi dasar akrual basis dan asumsi dasar entitas bisnis masing-masing memperoleh nilai rata-rata 3,00 dan 2,80 dengan kategori masing-masing cukup.

Menurut SAK EMKM, dalam menyusun laporan keuangan UMKM adalah menggunakan asumsi akrual basis, entitas bisnis, dan kelangsungan usaha. Akrual basis adalah asset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban diakui atau dicatat pada waktu terjadinya atau pada tanggal perolehannya, bukan berdasarkan kasnya sudah diterima atau dibayarkan. Pemahaman Pelaku UMKM mengenai asumsi akrual basis memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,00 atau kategori cukup. Ini artinya asumsi akrual basis ini belum diketahui atau belum difahami oleh Pelaku UMKM karena selama ini, Pelaku UMKM mencatat transaksi usahanya sesuai kas yang diterima atau kas yang dikeluarkan. Pencatatan transaksi berdasarkan kas yang diterima atau dikeluarkan disebut dengan dasar kas (*cash basis*).

Konsep entitas bisnis adalah entitas bisnis harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas lainnya. Konsep entitas bisnis atau kesatuan usaha menyatakan perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan atau badan ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi (Suwarjono:2005:215 dalam sari:2013). Transaksi yang berkaitan dengan bisnis atau UMKM tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut maupun dari transaksi entitas lain. Pemahaman Pelaku UMKM mengenai asumsi entitas bisnis memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,80 atau kategori cukup. Ini artinya asumsi entitas bisnis ini belum diketahui atau belum difahami oleh Pelaku UMKM karena selama ini, Pelaku UMKM mencatat transaksi usahanya tidak dipisahkan dengan transaksi pribadinya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Djumiarti Harnanto selaku Kepala Bidang Fasilitasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam sambutannya pada Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Lancang Kuning yang mengatakan bahwa “Masih banyak UMKM yang belum bisa memisahkan transaksi pribadi dengan transaksi usahanya”. Adanya masalah seperti ini membuat pelaku UMKM kesulitan dalam membuat laporan keuangan usahanya sehingga permasalahan selanjutnya yang timbul adalah sulitnya UMKM maju dan berkembang (<http://m.daririau.com>). Terlebih lagi bentuk UMKM yang

didominasi perusahaan perorangan yang mengakibatkan kurangnya kebutuhan untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Bentuk perusahaan perorangan juga menyebabkan pemisahan keuangan bagi diri pribadi pemilik usaha dengan kegiatan usahanya seringkali juga tidak dilakukan (Sari:2013).

Asumsi kelangsungan usaha (*going concern*) adalah kemampuan melanjutkan usaha di masa depan, kecuali jika entitas akan dilikuidasi, berhenti beroperasi tanpa alternatif lain. Dengan kata lain, asumsi kelangsungan usaha adalah kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya untuk tahun berikutnya. Pemahaman Pelaku UMKM mengenai asumsi kelangsungan usaha memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,05 atau kategori tinggi. Ini artinya Pelaku UMKM sudah memahami bahwa usaha yang dijalankannya, asumsinya akan berlanjut di masa yang akan datang. Pada umumnya semua pelaku usaha termasuk Pelaku UMKM mempunyai asumsi bahwa perusahaan atau entitasnya akan mampu melanjutkan usahanya.

Selain konsep pengukuran dan asumsi dasar, pemahaman terhadap SAK EMKM juga dapat diukur dari penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 4 pernyataan yaitu komponen minimum laporan keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi, dan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Dari hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata atas penyajian laporan keuangan sebesar 3,06 atau dengan kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru terhadap SAK EMKM mengenai konsep penyajian laporan keuangan masih pada tingkat cukup. Artinya rata-rata UMKM tidak tahu konsep penyajian laporan keuangan.

Tanggapan responden yang tinggi tentang SAK EMKM mengenai penyajian laporan keuangan, hanya pada pernyataan “Menurut SAK EMKM, laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan” yaitu dengan nilai rata-rata 4,20 (tinggi). Sedangkan tanggapan penyajian laporan keuangan tentang informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,64 (cukup), tanggapan penyajian laporan keuangan tentang informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,71 (cukup), dan tanggapan penyajian laporan keuangan tentang informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,71 (cukup).

Survey menemukan bahwa rata-rata Pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru sudah memahami bahwa komponen laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan namun Pelaku UMKM tersebut belum memahami informasi apa saja yang disajikan dalam ketiga laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, Pelaku UMKM tidak tahu akun-akun apa saja yang terdapat dalam laporan posisi keuangan, akun-akun apa saja yang terdapat dalam laporan laba rugi, dan informasi apa saja yang terdapat pada catatan atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa pemahaman Pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM di Kota Pekanbaru masih pada tingkat cukup. Pemahaman pada tingkat cukup ini, terutama pemahaman tentang konsep asumsi dasar yaitu konsep akrual basis dan konsep entitas bisnis serta konsep penyajian laporan keuangan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk konsep pengukuran biaya historis, asumsi kelangsungan usaha dan komponen laporan keuangan, Pelaku UMKM memiliki pemahaman yang tinggi.

REFERENSI

- Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru, 2017, Data UMKM Kota Pekanbaru
- DSAK IAI, 2016. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM), Ikatan Akuntan Indonesia
- Peraturan Presiden No 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
- Salmiah, Neneng. *et al* . 2015. Analisis Penerapan Akuntansi Pada UMKM Binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dan Kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (studi kasus pada UMKM Kecamatan Sukajadi di Kota Pekanbaru), Jurnal Akuntansi : Media Riset dan Akuntansi Keuangan, Vol.3 No.2 Tahun 2015
- Saragih Fitriani dan Surikayanti, 2015, Analisis Penerapan Akuntansi dan Kesuaiannya dengan SAK ETAP pada UKM Medan Perjuangan, SNEMA Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, ISBN : 978-602-17129-5-5.
- Sari, Dian Purnama, 2013, Telisik Perlakuan Teori Entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL, Volume 4 Nomor 2 Halaman 165-329, Agustus, ISSN : 2086 – 7603, e-ISSN : 2089 – 5879, Malang
- Suhairi, 2004, *Personality, Accounting Knowledge, Accounting Information Usage And Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries*, Disertasi, USM, Malaysia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Wiraharja, R.I, dan E.T. Wahyuni, 2009, *Majalah Akuntan Indonesia*, Edisi No. 19, Agustus.
- Yuliza, Arma dan Yunawati, Sri, Analisis, 2015, Pemahaman terhadap Penerapan SAK ETAP pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Pasir Pangaraian, Jurnal ilmiah Cano Economos Vol.4 No.1 Januari.s
- <http://m.daririau.com/read-9023179-2018-04-20-banyak-umkm-belum-bisa-pisahkan-transaksi-usaha-dengan-transaksi-pribadi>.